

Nama : Miranti Agustina

NIM : 09031381722092

Kelas : Sistem Informasi Reguler 2017

E-GOVERNANCE

1. Informational governance – A systematic literature review of governance for sustainability in the Information Age Katrine Soma ^{a,*}, Catrien J.A.M. Termeer ^b, Paul Opdam ^c

(2016)

Problem :

- 1) rendahnya penggunaan internet tidak dilihat sebagai masalah, karena hanya sekitar 50% personil hutan Yunani percaya bahwa layanan publik akan meningkat sebagai masalah penggunaan internet.
- 2) Literatur ini menginformasikan keberlanjutan masalah baru di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh TIK, merenungkan kebutuhan untuk pengaturan kelembagaan pemberdayaan baru (Asokhia, 2009; Hino, 2009; Omobowale, 2013; Zadorsky, 2009).
- 3) Era Informasi berkontribusi meningkatkan masalah lingkungan melalui perdagangan barang bekas TIK membuang e-waste di negara-negara Afrika (Omobowale, 2013).

2. Deploying governance networks for societal challenges

Adegboyega Ojo ^{a,*}, Sehl Mellouli (2016)

- 1) Bentuk organisasi publik dan bagaimana mengatur masyarakat masalah telah berubah secara dramatis dalam dua dekade terakhir. Lebih dari sebelumnya, pemerintah berurusan dengan aktor otonom lainnya di Indonesia untuk mewujudkan tujuan kebijakan mereka (E.-H. Klijn, 2002).
- 2) di samping tata kelola pendidikan yang terintegrasi, kesehatan, ekonomi, keamanan dan sektor lainnya dalam kerangka kerja program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan seperti Milenium Tujuan Pembangunan (MDG) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 (Swyngedouw, 2005; Huppé, Creech, & Knoblauch, 2012). Jaringan ini secara umum dapat ditargetkan untuk memecahkan masalah, menghasilkan ide, membangun hubungan dan membangun kepercayaan (Janowski, Pardo, & Davies, 2012).
- 3) Masalah Hollow State adalah dicirikan oleh proses pengambilan keputusan yang kompleks, dan pemberian layanan dan implementasi kebijakan didistribusikan di antara otonom aktor non-negara (E.-H. Klijn, 2002).

3. E-governance innovation: Barriers and strategies

Albert Meijer * (2015)

- 1) Masalah koordinasi aspek teknologi menurut Eynon and Margetts (2007: 81, 82) harus diatasi dengan mengembangkan bentuk 'koordinasi kacau'. Ini memungkinkan organisasi untuk mengubah front-end mereka sambil mempertahankan organisasi yang sama struktur di kantor belakang.
- 2) Program untuk meningkatkan digital keaksaraan dipandang penting untuk menghadapi hambatan struktural warga negara tetapi masalahnya adalah bahwa program-program ini bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan inovasi e-governance tertentu.
- 3) Masalah utamanya adalah itu meningkatkan proyek berarti bahwa dibutuhkan teknologi yang lebih kuat.

4. Agile government: Systematic literature review and future research (2018)

- 1) di lingkungan pemerintahan dengan keterbatasan sumber daya anggaran, legitimasi sosial dan penggunaan terbatas yang efisien
- 2) sebagian besar kurang dieksplorasi di pemerintahan konteks, adalah evaluasi pendekatan tangkas.

5. E-government research in the United States (John T. Snead a,*, ElisabethWright) (2014)

- 1) Hanya 9% t (9/100) dari penelitian yang menggunakan beberapa metode, yaitu bermasalah dalam bahwa ada "bukti triangulasi terbatas metode, yang - untuk beberapa metodologi kualitatif setidaknya - membentuk dasar untuk ketelitian dan validitas dalam temuan penelitian "
- 2) Area dan konteks target yang dikumpulkan seringkali sempit fokus (terutama pada tingkat praktik atau penerapan) ke tingkat itu tidak layak untuk menyajikan target dan konteks dalam gambar atau tabel.

6. Investigating the Role of Twitter in E-Governance by Extracting Information on Citizen Complaints and Grievances Reports

International Conference on Big Data Analytics, 2017

1) menyelidiki ekstraksi informasi dan visualisasi untuk mengekstrak informasi yang berguna

2) Pengajuan laporan keluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran warga negara dan perhatian pemerintah.

7. Measurement Framework for Evaluating e-Governance on Municipalities Websites

1) Sebelum menganalisis situs, tim telah menambahkan komentar singkat ke metrik yang mungkin memiliki interpretasi berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, seluruh tim pada awalnya telah bertemu bersama untuk menganalisis 152 metrik di situs untuk mengkonsolidasikan prosedur yang ditetapkan dan menyatukan kriteria untuk komentar yang dimasukkan.

8. IT Governance in E-Government Implementations in the Caribbean: Key Characteristics and Mechanisms

Arlene Bailey, Indianna Minto-Coy and Dhanaraj Thakur (2017)

1) gerakan pemerintah tetap lambat terhadap masalah yang lebih luas yang dihadapi masyarakat. Misalnya, negara umumnya tetap setidaknya 10 tahun yang baik di belakang dalam adopsi inovasi baru termasuk praktik, hukum dan peraturan sebagaimana diilustrasikan misalnya dalam waktu reformasi regulasi di industri telekomunikasi pada akhir 1990-an hingga awal 2000.

2) masalah spesifik yang dihadapi oleh negara-negara yaitu mempromosikan dan mengembangkan inisiatif e-government di seluruh wilayah

9. E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure: Benefits and Challenges

1) Namun, diamati bahwa sebagian besar negara tidak dilengkapi dengan memadai dalam hal personel dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani sejumlah masalah yang terlibat dalam implementasi NeGP yang efektif di bidang mereka masing-masing.

2) Keamanan data pengguna dan aplikasi adalah tanggung jawab penyedia cloud. Keamanan data, cadangan, dan pemulihan adalah masalah keamanan utama.

10. A RESTful E-Governance Application Framework for People Identity Verification in Cloud

Ahmedur Rahman Shovon, Shanto Roy, Tanusree Sharma,
and Md Whaiduzzaman(B) (2018)

- 1) Kurang tepat kerangka kerja, pengembangan konten, akses warga negara adalah masalah utama.
- 2) sejumlah besar data dapat membuat kekacauan dan redundansi. Untuk itu sistem E-Governance yang efektif harus hemat biaya, andal dan mudah dirawat. Sayangnya, teknologi saat ini tidak cukup untuk memenuhi keseluruhan persyaratan E-Governance